

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa Wadas terletak di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan dikenal memiliki kekayaan alam yang melimpah. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031, Kecamatan Bener ditetapkan sebagai kawasan hutan rakyat dan perkebunan. Desa Wadas, salah satu desa di Kecamatan Bener, memiliki hasil hutan yang melimpah. Komoditas perkebunan desa ini menghasilkan nilai ekonomi sebesar 8,5 miliar rupiah per tahun, sedangkan komoditas kayu keras mencapai 5,1 miliar rupiah per tahun. Lahan perkebunan di bukit Wadas telah menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat desa agraris ini secara turun-temurun.

Desa Wadas dikenal sebagai kawasan perbukitan yang kaya akan sumber mata air, dengan sekitar 27 mata air yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat. Desa ini menjadi ruang hidup dan aktivitas masyarakat, terutama kaum perempuan. Mereka memanfaatkan lahan untuk menanam berbagai tanaman seperti gula aren, kelapa, kakao, cengkeh, kopi, durian, dan temulawak, yang hasilnya menopang kehidupan masyarakat. Selain itu, perempuan di Desa Wadas juga membuat kerajinan besek dari bambu yang diambil dari hutan dan perkebunan sekitar. Tradisi menganyam bambu ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas serta budaya mereka selama ratusan tahun. Aktivitas ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga menjaga kelestarian alam tanpa eksploitasi yang berlebihan. Perempuan Wadas berperan penting dalam merawat lingkungan dan menjadi penjaga keseimbangan alam melalui cara hidup yang harmonis dengan bumi.

Namun, kehidupan masyarakat Desa Wadas kini mulai terganggu. Atas nama pembangunan, pemerintah bersama pihak pemodal terus merambah ruang hidup warga. Akibatnya, upaya pelestarian lingkungan sering kali terabaikan. Hal inilah yang terjadi di Desa Wadas setelah ditemukan batuan andesit di perbukitannya, yang dianggap penting sebagai bahan utama untuk pembangunan Bendungan Bener. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, mengeluarkan kebijakan yang dinilai merugikan warga Desa Wadas melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018. Dalam surat tersebut, Desa Wadas di Kecamatan Bener ditetapkan sebagai lokasi pembebasan lahan dan pengambilan batuan andesit untuk mendukung proyek pembangunan Bendungan Bener.

Proyek Bendungan Bener merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam rencana pertambangan quarry andesit di Desa Wadas, proses penambangan direncanakan menggunakan metode pengeboran, pengerukan, dan peledakan dengan total penggunaan 5.300 ton dinamit. Penambangan ini akan dilakukan hingga kedalaman 40 meter selama 30 bulan, mencakup area seluas 145 hektare, dengan target material sebesar 15.530.000 m³. Aktivitas ini diperkirakan akan menyebabkan kerusakan ekosistem secara signifikan.

Desa Wadas memiliki topografi yang rentan terhadap tanah longsor dan kekeringan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 huruf e Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo. Jika penambangan batuan dilakukan di area perbukitan Desa Wadas, potensi kekeringan akan meningkat karena perbukitan tersebut berfungsi sebagai area resapan air (Pasal 33 Perda RTRW Kabupaten Purworejo) yang menyimpan cadangan air. Penambangan ini berisiko merusak 27 titik sumber mata air di desa, yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Sumber Daya Air, khususnya terkait larangan aktivitas yang merusak daya dukung air. Selain itu, kegiatan ini

bertentangan dengan prinsip pertambangan yang seharusnya memperhatikan aspek lingkungan, sosial-ekonomi, dan hak asasi manusia. Pengalihfungsian lahan produktif menjadi tambang batuan andesit juga menghilangkan komoditas yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga. Dengan demikian, ekspansi tambang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Bendungan Bener dapat dikatakan sebagai bentuk nyata perampasan ruang hidup masyarakat Desa Wadas.

Proyek pembangunan bendungan yang direncanakan oleh PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk diklaim untuk kepentingan rakyat, namun realitanya justru berpotensi merusak wilayah yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Rencana ini lebih mengutamakan kepentingan segelintir pihak, terutama untuk menyuplai air ke Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) dan mendukung bisnis pariwisata di sekitar kawasan tersebut. Selain itu, warga Desa Wadas tidak dilibatkan dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), meskipun hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang telah direvisi oleh UU Cipta Kerja, serta Permen LH Nomor 17 Tahun 2012. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 menyatakan bahwa masyarakat yang terdampak langsung maupun tidak langsung harus dilibatkan dalam proses penyusunan dokumen AMDAL. Keterlibatan masyarakat ini merupakan inti dari peraturan perlindungan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009. Namun, penggabungan dokumen AMDAL untuk tambang dan bendungan melanggar Pasal 22 UU PPLH serta Permen LH Nomor 5 Tahun 2012. Selain itu, proyek ini bertentangan dengan asas UU Tata Ruang, yang mensyaratkan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) jika Proyek Strategis Nasional tidak sesuai dengan tata ruang yang ada. Hingga saat ini, RTRW Kabupaten Purworejo belum disahkan, menunjukkan adanya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Pemerintah Jawa Tengah dianggap lalai dalam menerbitkan izin lingkungan karena tidak melibatkan warga secara memadai. Berdasarkan rilis pers LBH Yogyakarta (2019), permohonan izin lingkungan yang diumumkan pada 4 September 2017 melalui banner yang dipasang di lingkungan Desa Wadas hanya meminta saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat setempat, namun tidak mencantumkan Desa Wadas sebagai salah satu lokasi yang akan dibebaskan lahannya. Hal ini bertentangan dengan izin lingkungan yang diterbitkan pada 8 Maret 2018, yang mencantumkan Desa Wadas sebagai wilayah yang lahannya akan dibebaskan.

Selain itu, pemerintah dinilai lalai karena tidak secara transparan menjelaskan dampak penambangan batuan andesit terhadap lingkungan dan masyarakat. Pemerintah juga kurang memperhatikan kondisi sosial masyarakat Desa Wadas, yang mayoritas bekerja sebagai petani, memiliki akses terbatas terhadap internet, dan kurang memahami mekanisme hukum dalam undang-undang. Kondisi ini membuat asumsi bahwa seluruh warga mengetahui keberadaan izin lingkungan dan dampaknya menjadi tidak realistis. Seharusnya, proses penyusunan AMDAL melibatkan akademisi dan institusi pendidikan untuk memberikan analisis yang berpihak pada kepentingan masyarakat dalam melindungi lahan dan ruang hidup mereka. Namun, dalam kasus ini, AMDAL justru digunakan sebagai formalitas untuk melegitimasi perusakan lahan dan perampasan ruang hidup warga.

Rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas untuk material pembangunan Bendungan Bener mendapat penolakan dari warga setempat. Penolakan ini diwujudkan melalui pembentukan Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA), yang secara konsisten memperjuangkan agar Desa Wadas dikeluarkan dari Izin Penetapan Lokasi (IPL) Bendungan Bener sebagai penyedia material proyek. Upaya penolakan dilakukan dengan mengajukan gugatan serta menyampaikan surat terbuka kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

Perlawanan juga muncul dari Wadon Wadas, kelompok perempuan Desa Wadas yang mayoritas terdiri dari ibu rumah tangga. Mereka menyuarakan keberatan dan keresahan terhadap rencana tersebut, dengan semangat perjuangan yang mengingatkan pada upaya R.A. Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Wadon Wadas adalah wujud nyata gerakan sosial ekofeminisme, lahir dari kesadaran kolektif akan dampak buruk penambangan. Selain memicu masalah ekologis, penambangan berpotensi merusak hubungan sosial yang telah terbangun dan mengancam keseimbangan antara perempuan Wadas dan alam yang mereka rawat selama ini. Gerakan ini mencerminkan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mempertahankan ruang hidup dari ancaman krisis multidimensi.

Bagi *Wadon Wadas*, filosofi bumi Wadas mengibaratkan kelestarian alamnya seperti tubuh manusia, di mana setiap bagiannya saling terhubung dan tidak dapat disakiti tanpa merusak keseluruhan. Jika bumi Wadas dikeruk, maka kerusakan akan merembet ke elemen alam lainnya. Dalam pandangan mereka, tanah adalah daging, air adalah darah, dan batu adalah tulang dari bumi Wadas. Alam ini bukan sekadar komoditas yang dapat dinilai dengan ganti rugi, terutama ketika proyek pembangunan mengancam ruang hidup yang telah membentuk budaya, lingkungan sosial, dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada alam. Jika salah satu elemen bumi Wadas diambil, keseimbangan seluruhnya akan hancur, sebagaimana manusia tidak bisa hidup tanpa daging, darah, atau tulang.

Berdasarkan hal tersebut, jika pembangunan Bendungan Bener tetap dilanjutkan, dampaknya akan menjadi bencana besar bagi bumi Wadas. Kerukan bukit akan merusak bentang alam, yang pada akhirnya sama dengan mengusir warga dari ruang hidup mereka. Hal ini juga akan berdampak berat pada perempuan, karena mereka adalah kelompok yang paling terdampak ketika terjadi bencana, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Kehidupan sehari-hari, termasuk kebutuhan air yang vital, akan terancam. Air,

yang menjadi nafas kehidupan, dibutuhkan perempuan untuk berbagai aktivitas, mulai dari memasak, merawat tanaman, hingga menjalankan ibadah. Tanpa air, keseimbangan kehidupan mereka akan runtuh.

Bagi kalangan ekofeminis, pembangunan yang diterapkan di negara-negara berkembang, yang sering kali diadaptasi dari model Barat, seringkali mengabaikan hak-hak perempuan dan merusak produktivitas mereka. Perempuan, sebagai kelompok yang paling terdampak, lebih banyak mengalami kerugian akibat dampak pembangunan. Pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan (Shiva, 1988). Konstruksi patriarki membuka ruang bagi dua bentuk penindasan: terhadap alam dan perempuan. Hal ini terjadi karena proyek kapitalisme yang rakus, di mana pihak-pihak berkepentingan memberikan janji-janji manis demi meloloskan niat mereka untuk menambang. Mereka berjanji akan mereklamasi lubang bekas tambang, menjadikannya objek wisata, memberikan ganti rugi yang menguntungkan, namun kenyataannya tidak demikian. Kasus lahan bekas tambang yang "katanya" akan direklamasi malah meninggalkan lubang-lubang berbahaya yang menakutkan bagi warga, bahkan memicu bencana yang mengakibatkan korban. Belum lagi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi yang ditinggalkan. Pada akhirnya, rakyat kecil yang menjadi korban. Dengan demikian, pembangunan Bendungan Bener dapat dilihat sebagai bentuk kolonialisasi yang termanifestasi dalam bentuk pembangunan. Oleh karena itu, perjuangan Wadon Wadas dalam menolak pembangunan ini harus mendapat dukungan dari semua pihak, karena masalah ini bukan hanya masalah satu wilayah. Jika satu wilayah dibangun, maka pembangunan lainnya akan mengikuti, yang berarti kerusakan ini akan terus berlanjut.

Dalam tulisan ini, penulis akan lebih jauh membahas hubungan antara Wadon Wadas dengan lingkungan, yang menjadi titik awal gerakan sosial menolak pembangunan Bendungan Bener di Purworejo. Penulis juga akan mengkaji bagaimana gerakan

ekofeminisme yang dilakukan Wadon Wadas berfokus pada penolakan terhadap pertambangan batuan andesit untuk pembangunan bendungan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan dan penjabaran yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keterkaitan antara Wadon Wadas dengan lingkungan yang menjadi titik awal munculnya gerakan sosial terhadap penolakan penambangan Batuan Andesit untuk Pembangunan Bendungan Bener, Purworejo?
2. Bagaimana gerakan ekofeminisme yang dilakukan masyarakat Wadon Wadas dalam gerakan sosial berupa penolakan penambangan Batuan Andesit untuk Pembangunan Bendungan Bener, Purworejo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengambarkan dan menganalisis keterkaitan antara Wadon Wadas dengan lingkungan yang menjadi titik awal munculnya gerakan sosial terhadap penolakan penambangan Batuan Andesit untuk Pembangunan Bendungan Bener, Purworejo.
2. Mengidentifikasi gerakan ekofeminisme yang dilakukan masyarakat Wadon Wadas dalam gerakan sosial berupa penolakan penambangan Batuan Andesit untuk Pembangunan Bendungan Bener, Purworejo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan studi ilmu politik dan pemerintahan khususnya mengenai gerakan sosial perempuan ekofeminisme di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu melengkapi penelitian-penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya serta dapat menjadi tambahan referensi dan wawasan dalam penelitian selanjutnya yang sekiranya memiliki pembahasan dan topik yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber data dan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi para civitas akademika untuk mengetahui gerakan ekofeminisme yang dilakukan masyarakat Wadon Wadas dalam gerakan sosial berupa penolakan penambangan Batuan Andesit untuk Pembangunan Bendungan Bener, Purworejo. Kemudian bagi para pembuat dan pelaksana kebijakan khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kritik dan masukan yang membangun untuk mengembangkan kebijakan terkait dengan penetapan lokasi pertambangan yang sesuai dengan peraturan perundangan dan asas-asas yang berlaku.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Gerakan Sosial

Masalah pertambangan di Indonesia seringkali menimbulkan konflik, karena di setiap lokasi pertambangan pasti ada ketegangan. Gerakan sosial muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap kebijakan yang ada. Gerakan sosial lahir dari situasi sosial yang dipicu oleh ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap masyarakat. Dengan kata lain, gerakan sosial adalah reaksi terhadap kebijakan yang tidak diinginkan oleh rakyat

atau yang dianggap tidak adil, serta keinginan untuk perubahan. Gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wadas melalui Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) adalah gerakan yang tumbuh dari inisiatif masyarakat untuk menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan, atau struktur pemerintahan. Dalam kasus ini, tuntutan perubahan muncul karena kebijakan yang ada dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat setempat dan bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Anthony Giddens (dikutip dari Suharko, 2006) mengartikan gerakan sosial sebagai usaha kolektif untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama melalui tindakan kolektif, tanpa campur tangan dari lembaga-lembaga yang sudah mapan. Lebih lanjut, Kaih (2002, dikutip dari Suwartiningsih et al., 2017) menjelaskan gerakan sosial sebagai kelompok informal yang terorganisir, yang bertujuan untuk mencapai perubahan sosial, terutama yang berkaitan dengan perubahan struktur atau nilai-nilai sosial. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Meyer dan Tarrow (1997), yang menyatakan bahwa gerakan sosial merupakan bentuk politik perlawanan yang dilakukan oleh rakyat biasa, yang kemudian bergabung dengan kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh.

Mirsel (2004) dalam bukunya *Teori Pergerakan Sosial* mengartikan gerakan sosial sebagai kegiatan kolektif yang terorganisir dan terfokus dengan tujuan untuk mencapai perubahan sosial dalam masyarakat. Gerakan sosial ini melibatkan partisipasi aktif dari individu atau kelompok yang berusaha untuk mengubah atau merespons ketidakadilan yang ada dalam sistem sosial, politik, atau ekonomi yang mereka hadapi. Gerakan sosial biasanya muncul sebagai reaksi terhadap ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada dan berupaya untuk menggugah atau mereformasi struktur sosial yang berlaku. Menurut Mirsel, gerakan sosial tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga berfokus pada perubahan sosial yang lebih mendalam yang dapat memengaruhi nilai, norma, atau kebijakan dalam masyarakat.

Definisi gerakan sosial menekankan dua aspek utama. Pertama, Gerakan sosial adalah suatu usaha kolektif yang terorganisir dengan tujuan untuk mengubah struktur sosial, politik, atau ekonomi yang ada. Perubahan ini bisa meliputi peningkatan kebijakan publik, hak-hak sosial, atau perombakan nilai dan norma dalam masyarakat. Gerakan ini melibatkan kelompok atau organisasi yang memiliki tujuan bersama untuk mengatasi kondisi yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai. Kedua, Gerakan sosial sering kali muncul sebagai reaksi terhadap ketidakpuasan atau ketidakadilan dalam masyarakat. Dalam hal ini, gerakan sosial melibatkan "tantangan kolektif," di mana individu atau kelompok bersatu untuk melawan sistem yang ada, seperti kebijakan pemerintah yang tidak adil, struktur sosial yang timpang, atau penindasan terhadap kelompok tertentu. Tujuannya adalah untuk mengubah atau menantang tatanan yang ada demi terciptanya keadaan yang lebih adil dan setara.

Crossley (2002, h. 10-13) dalam mendefinisikan gerakan sosial dan membagi tradisi analisis studi gerakan sosial berdasarkan dimensi waktu dan setting wilayah. Dalam dimensi waktu, tradisi studi gerakan sosial dapat dikelompokkan ke dalam dua dimensi yakni sebelum tahun 1970an dan setelah tahun 1970an. Sementara dalam pembagian wilayah, studi gerakan sosial dapat dilihat dalam konteks setting Eropa dan Amerika Serikat. Selanjutnya, Crossley menggambarkan peta teoritik studi gerakan sosial tersebut dalam sebuah tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pemetaan Teori Gerakan Sosial

Tahun	Amerika Serikat	Eropa
Sebelum era 1970	Perilaku (<i>collective behavior</i>)	Marxisme (<i>marxism</i>)

Setelah era 1970	Mobilisasi sumberdaya/proses politik <i>(resource mobilization political process)</i>	Gerakan sosial baru (<i>new sosial movement</i>)
------------------	---	--

Berdasarkan tabel diatas bisa disimpulkan bahwa berdasarkan fase waktu, gerakan sosial mengalami perubahan seiring dengan pergeseran paradigma dan tujuan gerakan sosial itu sendiri. Gerakan gerakan sosial hari ini bermetafora dengan isu dan wacana yang dibawa masing-masing, sesuai teoritik yang dijelaskan diatas gerakan sosial hari ini masuk dalam kategori gerakan sosial baru (new sosial movement).

1.5.2 Gerakan Sosial Baru

Menurut Singh (2001, h. 96), Perspektif Gerakan Sosial Baru muncul pada dekade 1970-an, khususnya di kalangan masyarakat Eropa dan Amerika, sebagai reaksi terhadap perubahan sosial yang terjadi di dunia Barat. Berbeda dengan gerakan sosial tradisional yang lebih berfokus pada perjuangan ekonomi dan kelas, seperti gerakan buruh, gerakan sosial baru lebih menekankan isu-isu seperti identitas, budaya, hak individu, lingkungan, dan kesetaraan gender. Pada masa itu, masyarakat mulai menyadari bahwa perjuangan untuk perubahan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi atau material, tetapi juga pada nilai-nilai budaya, hak asasi manusia, serta pengakuan terhadap kelompok yang terpinggirkan. Karena itu, gerakan sosial baru sering kali terkait dengan tuntutan perubahan norma sosial, seperti hak-hak perempuan, hak-hak minoritas, kesadaran ekologis, dan pembebasan sosial dari struktur dominasi patriarki. Singh juga menjelaskan bahwa gerakan sosial baru ini cenderung bersifat desentralisasi, dengan banyak gerakan yang tidak memiliki struktur organisasi formal dan lebih menekankan pada partisipasi langsung dari masyarakat. (Singh, 2010, h. 121-122).

Paradigma ideologi Gerakan Sosial Baru lebih menonjolkan perubahan nilai-nilai sosial dan budaya serta fokus pada isu-isu identitas, hak individu, kesetaraan gender, dan kesadaran ekologis. Berbeda dengan gerakan sosial tradisional yang lebih mengutamakan aspek ekonomi atau perjuangan kelas, Gerakan Sosial Baru lebih memperhatikan perjuangan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, seperti perempuan, minoritas, dan lingkungan hidup. Ideologi ini menekankan pentingnya pembebasan dari struktur dominasi patriarki dan hierarki sosial, serta mendorong perubahan dalam norma-norma sosial yang ada. (Sukmana, 2016:117).

McAdam, McCarthy, dan Zald (1996) dalam buku mereka yang berjudul *Comparative Perspective on Social Movements: Political Opportunity, Mobilizing Structure, and Culture Framings*, menjelaskan bahwa untuk memahami tumbuh dan berkembangnya gerakan sosial, ada tiga faktor utama yang perlu dianalisis, yaitu:

1. Peluang Politik (*Political Opportunities*)

Faktor ini merujuk pada kondisi politik eksternal yang memengaruhi kemungkinan kemunculan gerakan sosial. Peluang politik mencakup situasi yang memungkinkan kelompok sosial untuk menantang kekuasaan yang ada, seperti perubahan kebijakan pemerintah, terbukanya sistem politik, atau ketegangan sosial. Ketika sistem politik lebih terbuka atau rentan, individu dan kelompok cenderung lebih aktif dalam gerakan sosial karena mereka merasa ada peluang untuk mempengaruhi perubahan atau kebijakan.

2. Struktur Mobilisasi (*Resource Mobilization*)

Struktur mobilisasi mengacu pada organisasi, jaringan, atau saluran yang memungkinkan individu atau kelompok untuk berkumpul dan berorganisasi dalam suatu gerakan sosial. Ini mencakup organisasi formal seperti serikat pekerja, LSM, atau partai politik, serta jaringan informal seperti keluarga, teman, dan komunitas.

Struktur mobilisasi menyediakan sumber daya, keterampilan, dan hubungan sosial yang dibutuhkan untuk mengorganisir peserta dan menyebarkan pesan gerakan. Tanpa struktur mobilisasi yang efektif, sulit bagi gerakan sosial untuk berkembang atau bertahan.

3. Proses Pembingkaihan (*Framing Processes*).

Pembingkaihan budaya berkaitan dengan cara gerakan sosial membentuk dan menyebarkan pemahaman atau interpretasi mengenai isu-isu tertentu. Ini melibatkan narasi atau kerangka budaya yang digunakan untuk mengartikulasikan masalah dan mendorong orang untuk bertindak. Pembingkaihan budaya berfungsi untuk memberi makna sosial pada para peserta dan masyarakat luas serta membentuk identitas kolektif dalam gerakan tersebut. Framing ini juga menjelaskan mengapa suatu isu penting dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya, sekaligus memotivasi orang untuk bergabung dengan gerakan sosial

1.5.3 Ekofeminisme

Ekofeminisme merupakan gabungan dari dua konsep, yaitu ekologi dan feminisme. Ekologi, yang berasal dari kata Yunani "Oikos" yang berarti rumah atau tempat tinggal, mencakup semua makhluk hidup dan unsur alam seperti hewan, tumbuhan, air, tanah, udara, dan matahari (Isshiki, 2000). Ekologi meneliti hubungan antara sesama makhluk hidup atau ekosistem, serta lingkungan seperti alam, hewan, dan tumbuhan. Kesadaran ekologi berusaha melihat dunia secara holistik dan integral, mengakui keragaman yang ada di dalamnya (Buntaran, 1996).

Feminisme, di sisi lain, lahir untuk mengatasi ketimpangan gender, diskriminasi, penindasan, dan kekerasan terhadap perempuan. Menurut Kamla Bahsin Akhmad (dikutip dari Ilyas, 1997), Feminisme merupakan gerakan sosial dan ideologi yang berorientasi pada kesetaraan gender, dengan penekanan pada hak-hak perempuan. Tujuan utama feminisme

adalah mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi yang dialami perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Gerakan ini berjuang untuk memastikan perempuan memiliki akses yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, kekuasaan politik, serta kontrol atas tubuh dan kehidupan pribadi mereka.

Ekofeminisme sebagai suatu pemikiran dan gerakan masih tergolong baru di Indonesia. Gerakan ini jarang terlihat secara jelas karena gerakan perempuan dan gerakan penyelamatan alam umumnya berkembang secara terpisah. Namun, sejumlah perempuan dan aktivis sepakat bahwa ekofeminisme adalah teori atau cara pandang yang mengaitkan tekanan terhadap bumi dan perempuan. Keduanya memiliki kesamaan inti, yakni ketidakberdayaan dan ketidakadilan, yang menyebabkan perempuan ditempatkan dalam posisi yang setara dengan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, seperti yang dipandang dalam kerangka sosial yang membedakan antara kaya dan miskin, baik dan buruk.

Shiva (1988) dalam bukunya *Staying Alive: Woman, Ecology, and Survival in India* mengemukakan bahwa alam memiliki sisi feminin yang erat kaitannya dengan spiritualitas India. Shiva menggambarkan hubungan perempuan India yang sangat dekat dengan alam, yang tercermin dalam tragedi ironis yang dialami oleh perempuan-perempuan India dalam gerakan Chipko. Gerakan ini berusaha mempertahankan hutan dari eksploitasi, yang tidak hanya mencengkeram alam tetapi juga menindas perempuan. Menurut Shiva, konsep pembangunan yang mendukung kemajuan industri kapitalis adalah hasil dari budaya patriarki (Zega & Putri, 2014).

Menurut Shiva dan Mies (2005), ekofeminisme adalah sebuah gerakan dan perspektif yang menghubungkan penindasan terhadap perempuan dengan kerusakan lingkungan. Ekofeminisme melihat bahwa eksploitasi terhadap alam dan perempuan memiliki akar yang sama, yaitu dalam struktur sosial dan ekonomi yang patriarkal. Mereka berpendapat bahwa dominasi terhadap perempuan dan alam merupakan bagian dari sistem yang mengutamakan

kontrol dan pemanfaatan tanpa mempedulikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Ekofeminisme mendorong pemahaman yang lebih holistik tentang hubungan antara manusia, alam, dan gender, serta memperjuangkan keadilan ekologis dan sosial yang setara bagi perempuan dan lingkungan. Shiva dan Mies (2005) mengangkat kembali istilah ekofeminisme dalam buku *Ekofeminisme: Gerakan Perempuan dan Lingkungan* sebagai kritik terhadap dampak negatif globalisasi. Mereka berpendapat bahwa globalisasi modern, dengan fokusnya pada kapitalisme dan eksploitasi sumber daya alam, sering kali memperburuk penindasan terhadap perempuan dan kerusakan lingkungan. Dalam pandangan mereka, globalisasi menyebabkan degradasi lingkungan yang lebih parah, sementara juga memperburuk ketidaksetaraan gender, di mana perempuan, terutama yang berada di komunitas lokal atau pedesaan, menjadi korban dari sistem yang merusak baik manusia maupun alam. Ekofeminisme, menurut mereka, berfungsi sebagai kritik terhadap struktur global yang menghubungkan eksploitasi terhadap alam dan penindasan terhadap perempuan dalam satu sistem yang saling memperkuat. (Hikmawan & Hidayat, 2016).

Lorentzen dan Eaton (2002, h. 2) menegaskan bahwa perempuan memiliki hubungan yang lebih erat dengan alam dibandingkan laki-laki, karena mereka sering terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan, yang umumnya berhubungan dengan tugas rumah tangga dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Aktivis ekofeminisme, yang kebanyakan adalah perempuan, menyadari posisi strategis dan politis mereka, karena mereka memahami adanya hubungan erat antara penindasan terhadap perempuan dan kerusakan lingkungan. Kesadaran inilah yang mendorong mereka untuk memperjuangkan keadilan sosial dan ekologis serta mengubah struktur dominasi yang merusak hubungan antara manusia dan alam.

Dalam hal ini, perempuan berada dalam posisi yang sangat penting untuk mendorong terciptanya paradigma intelektual dan praktis tentang ekologi. Selain itu, peran perempuan yang secara biologis dapat “melahirkan” dianggap sebanding dengan alam itu sendiri. Di beberapa budaya, seperti di Indonesia, alam sering kali dianggap bersifat feminin. Bumi bahkan disebut sebagai "Ibu Pertiwi". Peran ibu seperti ini yang membuat perempuan terbiasa dengan aktivitas merawat, mengasuh, atau menjaga lingkungan, seperti yang mereka lakukan pada anak-anaknya. Aktivitas semacam ini juga dibutuhkan oleh alam yang, dalam perspektif ekofeminisme, telah lama dieksploitasi secara besar-besaran, dijadikan objek yang dikuasai dan didominasi.

Ada hubungan yang erat antara perempuan dan alam, yang dikenal oleh Warren sebagai *interconnection* atau keterkaitan, yang mencakup pemahaman bahwa perempuan dan alam saling bergantung satu sama lain. Warren berpendapat bahwa perempuan sering kali memiliki peran penting dalam menjaga dan mengelola lingkungan, terutama dalam konteks tradisional di mana mereka berperan dalam pemeliharaan sumber daya alam untuk kebutuhan keluarga dan komunitas. *Interconnection* ini menggarisbawahi bahwa penindasan terhadap perempuan dan eksploitasi alam terjadi dalam kerangka sistem sosial yang lebih besar, seperti patriarki dan kapitalisme, yang menempatkan perempuan dan alam dalam posisi yang terpinggirkan dan dieksploitasi. Dengan demikian, ekofeminisme berupaya untuk mengatasi ketidakadilan terhadap perempuan dan lingkungan secara bersamaan.

Taylor (2005, h. 2) menjelaskan bahwa masalah perempuan dalam konteks ekofeminisme merupakan isu yang sangat kompleks dan mencakup berbagai dimensi, seperti dimensi politis, ideologis, dan kultural. Isu-isu ini saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan, karena penindasan terhadap perempuan dan kerusakan lingkungan sering kali berakar pada sistem dominasi yang lebih besar, seperti patriarki dan kapitalisme. Dalam

pandangan ekofeminisme, perempuan bukan hanya korban ketidaksetaraan gender, tetapi juga terdampak oleh kerusakan lingkungan yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peran mereka dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kompleksitas isu lingkungan dan perempuan dalam ekofeminisme adalah objek kajian yang menarik untuk dibahas dalam berbagai aspek, yang mencakup dimensi ruang dan waktu. Kajian ekofeminisme tidak statis, melainkan berkembang seiring perubahan konteks politik, ideologi, dan budaya. Selain itu, masalah kultural terkait pandangan terhadap perempuan dalam budaya tertentu turut memengaruhi perjuangan para aktivis ekofeminis. Pendekatan dan isu yang diperjuangkan oleh para pegiat ekofeminisme juga bervariasi dan kontekstual tergantung pada situasi masing-masing budaya.

Dalam tulisan ini, penulis mengacu pada definisi ekofeminisme yang diajukan oleh Vandana Shiva sebagai acuan utama untuk menjaga konsistensi penulisan. Ekofeminisme adalah suatu etika yang menentang pandangan dualistik dalam hubungan antara manusia dan alam, yang menganggap alam sebagai entitas hidup, bukan sekadar objek mati. Pandangan tersebut, yang melihat alam tanpa hak, menciptakan hierarki, di mana manusia terus mengeksploitasi alam tanpa memberikan penghargaan yang semestinya. Ekofeminisme menyoroti pentingnya pemahaman mengenai ketergantungan antara manusia, alam, dan seluruh entitas yang ada, serta berusaha untuk menggantikan struktur hierarkis yang dibentuk oleh budaya patriarki. Tujuan gerakan ini adalah untuk mengubah relasi dominan antara laki-laki dan perempuan, antar kelompok manusia, serta antara manusia dan alam, dengan menumbuhkan kesadaran bahwa semua entitas adalah bagian dari ekosistem yang saling terhubung dan bergantung (Zega & Putri, 2014).

1.6 Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu terhadap gerakan Wadon Wadas belum pernah dilakukan semenjak gerakan ini muncul. Oleh karena itu, peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik gerakan perempuan ekofeminisme di Indonesia selain gerakan Wadon Wadas. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti:

Pertama, penelitian yang dilakukan Anisa Innal Fitri dan Idil Akbar dari Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran yang berjudul “Gerakan Sosial Perempuan Ekofeminisme di Pegunungan Kendeng Provinsi Jawa Tengah Melawan Pembangunan Tambang Semen.” Peneliti memfokuskan pada suatu gerakan sosial perempuan yang dapat berperanstrategis untuk menguatkan gerakan-gerakan perlawanan masyarakat, sebagai agen untuk memperjuangkan hak-hak demokratis, keadilan dan pembebasan rakyat. Demikian pula halnya dalam gerakan tani, gerakan perempuan adalah sebagai salah satu elemen penggerak perjuangan rakyat (petani dan buruh tani) dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Gerakan perempuan yang dibahas dalam tulisan kali ini adalah mengenai perlawanan para srikandi yang tinggal di sekitar Pegunungan Kendeng, yang setiap harinya melakukan aktivitas interaksi dengan alam. Saat ini Pegunungan Kendeng didirikan Pabrik Semen oleh PT Semen Indonesia, produsen semen raksasa yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang rencananya akan mulai beroperasi pada tahun 2017. Para remaja perempuan dan ibu disana menolak langkah apapun terkait pendirian pabrik semen karena diyakini akan merusak sumber daya air dan mematikan sektor pertanian. Tulisan ini disertai landasan literatur mengenai masyarakat sipil dan gerakan sosial. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti gerakan sosial perempuan.

Kedua, Penelitian yang dilakukan Hajeng Pandu Nagari dari Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Agung Tirtayasa yang berjudul “Gerakan Sosial Ekofeminisme Melawan Penambangan Marmer di Gunung Mutis Nusa Tenggara Timur.” Tulisan ini bertujuan untuk memahami pergerakan ekofeminisme yang tidak dapat dipisahkan dari ketidaknyamanan perempuan pada praktik kerusakan ekologis dimana gerakan sosial adalah faktor terpenting dalam mewujudkan perubahan sosial. Dimana kehadiran mereka bertujuan untuk mewujudkan perubahan sosial yang lebih baik dan memenuhi kepentingan rakyat. Gerakan sosial ekofeminisme yang dibahas dalam tulisan ini adalah tentang perlawanan perempuan dari timur yang tinggal di sekitar gunung mutis, yang setiap hari melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan alam. Pada 2006 ada gerakan sosial perempuan berupa penolakan penambangan marmer di sekitar gunung mutis yang dilakukan dengan menenun di Kawasan penambangan Gunung Mutis selama satu tahun. Dalam kasus penolakan penambangan marmer oleh perempuan suku adat Mollo, para perempuan telah mewujudkan responnya dalam bentuk gerakan sosial melawan aktivitas penambangan marmer di sekitar Gunung Mutis, mereka merasa memiliki hak atas tanah adat mereka agar tidak di eksploitasi dan di rusak oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan pembangunan industri. Dalam hal ini perempuan Mollo mampu berperan menjadi agen perubahan untuk mengusir aktivitas penambangan marmer di tanah adat mereka sehingga mereka mampu mencapai perubahan sosial dengan perginya aktivitas penambangan marmer di Sekitar Gunung Mutis karena Gerakan Sosial menenun di atas lokasi tambang yang mereka lakukan. Penelitian ini sama sama membahas mengenai gerakan ekofeminisme dalam melakukan gerakan sosial berupa penolakan terhadap hadirnya penambangan, serta melihat relasi antara perempuan dengan lingkungan yang menjadi titik awal adanya gerakan sosial itu sendiri.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan Tri Marhaeni Puji Astuti dari Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang yang berjudul

“Ekofeminisme Dan Peran Perempuan Dalam Lingkungan.” Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa konservasi lingkungan juga harus lebih memahami pola pikir masyarakat lokal. Pola pikir yang ‘lebih memahaminya’, humanis, empati, ini identik dengan pola pikir ekofeminisme yang mencoba membuat terobosan keadilan untuk alam dengan analogi masyarakat bahwa alam selalu di mitoskan sebagai perempuan. Karena mitos tersebut maka pola pikir para ekofemism akan bersahabat dengan alam, memahami alam, timbul empati terhadap alam dengan mengembangkan kesetaraan dan keadilan bagi alam tanpa eksploitasi dan tanpa merugikan alam. Bukan pola pikir sebaliknya yang mengeksploitasi dan merugikan alam. Fokus penelitian ini konservasi lingkungan yang berbasis pada masyarakat lokal yaitu suku Butet (manusia rimba) yang berada di Jambi. Untuk memitoskan alam sebagai perempuan. Persamaannya adalah sama sama membahas tentang ekofeminis tapi lebih memfokuskan pada memitoskan alam sebagai perempuan. Melihat bahwa suku Kubu manusia Rimba di Jambi tidak bisa membaca, menulis dan menghitung. Namun mereka menolak pintar karena dianggap bagi mereka orang pintar identik dengan penipuan dan penindasan. Namun butet memiliki pendekatan tersendiri terkait dengan Anak rimba, menulis dan menghitung. Penelitian ini menggunakan konsep ekofeminis, Karen J Warren (dalam Arivia, 2002) mengatakan bahwa keterkaitan tersebut tidak mengherankan mengingat bahwa masyarakat kita dibentuk oleh nilai, kepercayaan, pendidikan, tingkah laku yang memakai kerangka kerja patriarkhi, dimana ada justifikasi hubungan dominasi dan sub-ordinasi, penindasan terhadap perempuan oleh laki-laki. Dengan pendekatan Menggunakan metode Historis. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih fokus pada isu perempuannya yang menolak adanya penambangan batuan andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, penolakan oleh perempuan ini berlangsung sejak tahun 2015 sampai sekarang dan mengapa perempuan itu bisa terlibat dalam aksi penolakan adanya tambang tersebut. Perbedaan juga dari setting tempat

dan isu yang di angkat. Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama membahas tentang ekofeminisme penelitian ini lebih menekankan ke gerakan penolakan yang dilakukan oleh kaum wanita sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliian terdahulu adalah tentang cara pemaknaan alam yang terhadap wanita yaitu menyamakan alam seperti manusia layaknya ibu sendiri.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memiliki keterkaitan dengan topik gerakan perempuan ekofeminisme di Indonesia dan juga telah disebutkan diatas bahwa penulis melihat adanya perbedaan sudut pandang dan fokus dengan penelitian ini. Fokus studi pada penelitian ini adalah gerakan perempuan Wadon Wadas di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo untuk memperkaya sejarah dan merangkap gerakan perempuan Indonesia. Karena gerakan ini memiliki keunikan. Mereka adalah bagian subyek dari perlawanan, bukan sebagai alat untuk strategi dari gerakan sosial melawan kekuatan korporasi. Signifiiasi studi ini secara teoriti adalah memberi kontribusi pada studi gerakan sosial, terutama pengetahuan tentang bentuk gerakan feminis batas lokal. Pendekatan structural bagaimana melihat gerakan sosial muncul dipermukaan karena ketidakadilan kesetaraan. Gerakan sosial dalam agenda isu yang diangkat ini adalah gerakan sosial perempuan. Bagaimana seorang perempuan mempunyai ambisi dan dorongan yang tinggi, untuk dapat membongkar dan keluar dari ruang domestiknya, bersejajar dengan laki-laki untuk memperjuangkan lingkungan tempat tinggalnya. Perjuangan melawan korporasi pertambangan.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono (2016, h. 2) merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ilmiah secara umum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif ialah untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam. Sugiyono (2016, h. 9) menjelaskan tentang metode penelitian kualitatif sebagai berikut:

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Dengan metode kualitatif, penelitian ini hendak mengetahui secara mendalam mengenai relasi antara Wadon Wadas dengan lingkungan yang menjadi titik awal adanya gerakan sosial terhadap penolakan pembangunan Bendungan Bener, Purworejo, serta melihat bagaimana gerakan ekofeminisme yang dilakukan Wadon Wadas yang melakukan gerakan sosial berupa penolakan terhadap Pernambangan Batuan Andesit untuk Pembangunan Bendungan Bener, Purworejo dengan teknik-teknik pengambilan data melalui wawancara dan studi dokumentasi.

1.7.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan perilaku (*behavioral approach*). Metode deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

Dengan metode deskriptif, penelitian ini hendak mengetahui bagaimana keterkaitan gerakan sosial yang dilakukan perempuan Wadon Wadas dalam melakukan penolakan

pertambangan batuan andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo. Kemudian, pendekatan perilaku akan digunakan untuk menggali fakta-fakta terkait tindakan-tindakan yang belum diketahui, dan belum dipahami kebenarannya.

1.7.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan wilayah atau lokasi dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah tanpa ada manipulasi. Sehingga penelitian ini dilaksanakan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa tengah sebagai tempat yang dijadikan area penambangan batuan andesit untuk pembangunan Bendungan Bener.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang mampu memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan purposive sampling dengan teknik snowball sampling. Menurut Sugiyono (2016, h. 218), purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu seperti misalnya seseorang yang dianggap paling tahu tentang hal yang diharapkan. Sedangkan snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang sifatnya bergulir sesuai dengan informasi yang diperoleh dari informan kunci. Yang mana informasi yang didapatkan dari informan kunci kemudian digunakan sebagai petunjuk mengenai individu lain yang layak dijadikan informan selanjutnya dalam penelitian.

Subjek dalam penelitian ini merupakan individu yang terkait dengan gerakan sosial ekofeminisme dalam melakukan penolakan terhadap penambangan batuan andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa tengah yaitu masyarakat asli desa Wadas yang tergabung dalam Gempadewa, serta tokoh Wadon Wadas.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data merupakan bagian penting dalam proses penelitian. Sumber data menjadi acuan peneliti untuk mengumpulkan data. Data tersebut berguna untuk menjawab kejadian atau peristiwa yang sedang diteliti. Maka kualitas penelitian sangat bergantung pada data yang telah diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, data dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber data atau dari tangan pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari informan melalui teknik wawancara. Sebagai sumber data primer, data yang diperoleh dari teknik wawancara merupakan data yang berguna untuk menjawab permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan dengan pihak yang terlibat yaitu masyarakat asli desa Wadas yang tergabung dalam Gempadewa, serta tokoh Wadon Wadas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder berguna sebagai pendukung data primer yang telah diperoleh. Data sekunder dapat diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, arsip resmi, hasil sensus, laporan, buku, jurnal, dan lain-lain baik yang telah dipublikasi maupun yang belum dipublikasikan.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai sumber, diantaranya dokumen resmi pemerintah, arsip, laporan, dan lain-lain yang dapat mendukung peneliti dalam menjawab masalah penelitian. Sumber-sumber yang digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber-sumber

yang berisi informasi mengenai relasi antara Wadon Wadas dengan lingkungan yang menjadi titik awal adanya gerakan sosial terhadap penolakan pembangunan Bendungan Bener, Purworejo, serta melihat bagaimana gerakan ekofeminisme yang dilakukan Wadon Wadas yang melakukan gerakan sosial berupa penolakan terhadap Pernambahan Batuan Andesit untuk Pembangunan Bendungan Bener, Purworejo.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting. Teknik ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan, yaitu sesuai dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, teknik yang umum digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Mengamati sesuatu melalui penglihatan, penciuman, pendengaran. Teknik observasi ini dilakukan peneliti dengan mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian dengan maksud mencocokkan data yang diperoleh berdasarkan teknik pengumpulan data lainnya. Observasi dilakukan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, dimana pertanyaan yang di berikan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive dengan teknik snowball. Dimana pada awalnya ditentukan terlebih dulu informan kunci yang dianggap ahli atau memiliki pengetahuan tentang unsur-unsur masyarakat yang diperlukan dalam penelitian. Kemudian informasi yang didapatkan dari informan kunci tersebut digunakan sebagai petunjuk dalam menentukan informan yang diperlukan selanjutnya.

Data yang ingin diperoleh dengan teknik wawancara dalam penelitian ini adalah data berupa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh informan terkait dengan konflik penambangan batuan andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, khususnya pada gerakan sosial ekofeminisme yang dilakukan kaum perempuan Desa Wadas. Wawancara akan dilakukan dengan masyarakat asli desa Wadas yang tergabung dalam Gempadewa, serta tokoh Wadon Wadas.

Wawancara dilakukan untuk mengetahui relasi apa yang terjadi antara Wadon Wadas dengan lingkungan yang menjadi titik awal adanya gerakan sosial terhadap penolakan pembangunan Bendungan Bener, Purworejo. Selain itu, wawancara juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana gerakan ekofeminisme yang dilakukan Wadon Wadas yang melakukan gerakan sosial berupa penolakan terhadap Pernambangan Batuan Andesit untuk Pembangunan Bendungan Bener, Purworejo.

Table1.1 Daftar Informan

No.	Informan	Kategori	Jumlah	Data yang diharapkan
1.	Gempadewa	Masyarakat	1	Infomasi mengenai perijinan dan proses penyusunan AMDAL dalam rencana

				pembebasan lahan pada lokasi pengambilan bahan material berupa batuan andesit untuk tujuan pembangunan Bendungan Bener, Purworejo. Serta, dinamika gerakan penolakan oleh masyarakat desa Wadas.
2.	Wadon Wadas	Mayarakat	2	Informasi mengenai alasan apa yang melatar belakangi gerakan sosial perempuan ekofeminisme yang dilakukan Wadon Wadas yang menjadi titik awal adanya terhadap penolakan pembangunan Bendungan Bener, Purworejo.

3. Studi Dokumentasi

Tidak kalah penting dari metode-metode sebelumnya, metode ini adalah dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti

apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.

Pengumpulan dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen seperti dokumen resmi pemerintah, arsip, laporan, hasil penelitian, catatan, buku dan lain-lain sesuai kebutuhan peneliti yang terkait dengan gerakan ekofeminisme yang dilakukan Wadon Wadas yang melakukan gerakan sosial berupa penolakan terhadap Pernambangan Batuan Andesit untuk Pembangunan Bendungan Bener, Purworejo yang dapat menunjang dan memperkuat data-data yang diperoleh dari wawancara. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan agar menjadi suatu hasil kajian yang utuh.

1.7.6 Analisis Data

Teknik analisis data yang dimaksud adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengolah data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi secara terstruktur. Teknik ini bertujuan untuk menganalisis, menafsirkan, dan memeriksa data sehingga dapat menghasilkan wawasan baru yang dapat menjawab fokus penelitian. Sugiyono (2016, h. 244) menjelaskan bahwa analisis data merupakan suatu proses untuk mengorganisasi, menyusun, mengolah, dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan, guna memahami informasi yang terkandung di dalamnya. Tujuan dari proses ini adalah untuk memperoleh temuan yang signifikan, yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan atau memecahkan masalah yang diteliti. Teknik analisis data dapat bervariasi, seperti analisis statistik, analisis kualitatif, atau kombinasi keduanya, sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data menurut model Miles dan Huberman yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

1. Reduksi Data

Poses dalam reduksi data adalah membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengaharapkan hal-hal penting, menggolongkan mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna. Jadi, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan kemudian disimpulkan dengan tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Data yang sudah diatur sedemikian rupa (dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan. Namun, kesimpulan tersebut hanya bersifat sementara dan umum. Untuk memperoleh kesimpulan yang “grounded” maka perlu dicari data lain yang baru untuk melakukan pengujian kesimpulan tentative.